

## ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan wewenang bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara leluasa. Berdasarkan hal tersebut Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan layanan fasilitas penyaluran kredit bagi koperasi dan UMK. Layanan penyaluran kredit UMK disalurkan kepada koperasi dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengevaluasi prosedur penyaluran kredit pada UMK oleh Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penulisan tugas akhir, penulis melakukan peninjauan terhadap unsur-unsur pembentuk sistem yaitu: fungsi terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi dan flowchart yang berkaitan dengan prosedur fasilitas layanan penyaluran kredit pada UMK.

Hasil evaluasi prosedur layanan penyaluran kredit pada UMK oleh Dinas Koperasi DIY terdiri dari beberapa kelebihan antara lain adalah sudah terdapatnya pemisahan fungsi, dokumen yang digunakan sudah cukup lengkap dan otorisasi dilakukan sesuai dengan pemberi wewenang. Selain itu terdapat pula beberapa kelemahan yang terjadi diantaranya adalah bendahara pengelola melakukan fungsi ganda, terdapat dokumen yang belum bernomor urut tercetak dan tidak terdapatnya tembusan proposal.

Berdasarkan kelemahan yang terjadi dari hasil evaluasi prosedur layanan penyaluran kredit pada UMK oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY, penulis menyarankan agar Dinas Koperasi dan UMKM memberikan batasan tugas untuk bendahara pengelola agar tidak terjadi tugas ganda, pemberian nomor urut tercetak terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dan harus ada tembusan proposal.

Kata Kunci: prosedur, layanan penyaluran kredit pada UMK